

Kondisi Terkini Pengerjaan Jalan Pantura Flores Pota-Wae Kelambu

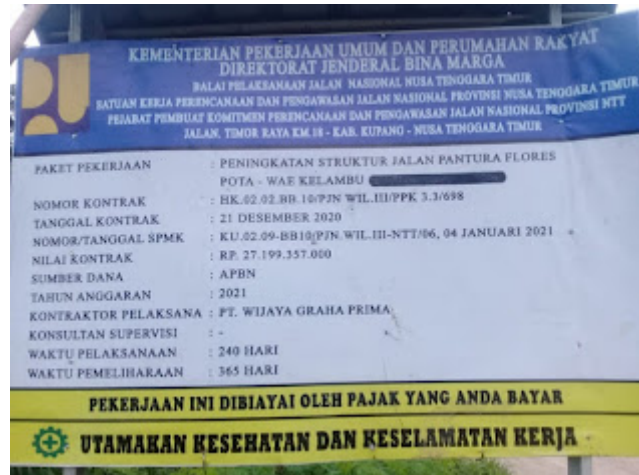


Borong, mwartapedia.com – Pemerintah pusat terus membuktikan komitmennya dalam membangun infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

Salah satu ruas jalan yang terus dibangun adalah pembangunan jalan Nasional Jalur Pantura Flores, Pota-Wae Kelambu.

Proyek peningkatan struktur jalan pantura Flores Pota-Wae Kelambu ini merupakan jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pantauan media ini, Kamis(03/06/2021) di lokasi pengerjaan jalan tersebut, pengerjaannya berjalan sesuai waktu yang ditentukan, serta sangat memperhatikan seluruh tahapan pengerjaan juga kualitasnya.



Seluruh tahapan Pembuatan Jalan dan Pengaspalan ini berjalan dengan baik, mulai dari Pekerjaan Pemetaan (Pengukuran badan Jalan), Pekerjaan Clearing dan Grubbing (Pembersihan badan Jalan dari Pohon dan sampah), Pekerjaan Stripping (Pembentukan badan Jalan), Pekerjaan Sub Grade (Pemadatan tanah), Pekerjaan Sub Base Course (Lapis Pondasi Bawah), dan sekarang memasuki Pekerjaan Base Course (Pondasi Atas).

Dekiteahui Sumber dana proyek pembangunan infrastruktur jalan ini ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai Kontraktor Pelaksana adalah, PT. Wijaya Graha Pratama(PT. WGP), dengan besaran nilai kontrak Rp. 27.199.357.000, dan nomor kontrak. HK.02.02.BB.10/PJN WIL.111/PPK.3.3/698, tahun anggaran 2021. (ML/IB)

Gubernur NTT Dampingi Kunker Menteri PPN/Kepala Bappenas

di Pulau Sumba



Kupang, mwartapedia.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr.Ir. Suharso Monoarfa melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pulau Sumba, Jumat (4/6).

Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama rombongan tiba menggunakan menggunakan Pesawat Private Flight Type A/C di Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Kabupaten Sumba Timur sekitar pukul 09.10 Wita.

Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, Bupati Sumba Timur, Kristofel Praing, Wakil Bupati Sumba Timur David Melo Wadu, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Tampak pula hadir Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, Kadis PUPR NTT, Maxi Nenabu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Lecky Koli, staf khusus Gubernur NTT, Daniel Kameo, Imanuel Blegur, Pius Rengka.

Dalam agendanya pertamanya, Menteri Suharso bersama Gubernur NTT beserta rombongan bertolak mengunjungi dan melihat secara langsung kondisi Bendungan Kambaniru di Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur yang rusak parah dikarenakan pada bulan April lalu diterjang banjir bandang akibat Badai Siklon Tropis

Seroja.

Sementara itu demi mencukupi kebutuhan air petani dan masyarakat sekitar, dilakukan penanganan yang bersifat darurat, yakni dengan merencanakan empang dan tanggul di hulu sungai sejauh 300 meter dari sungai dengan menggunakan beronjong. Dengan tujuan mengalirkan air ke bangunan pengambilan air dengan saluran pengalih. Sehingga air mampu mengalir kembali ke saluran irigasi.

Untuk penanganan permanen perbaikan masih dalam tahap persiapan desain dengan kebutuhan rehab Bendungan Kambaniru sebesar Rp 90 miliar, yakni melalui APBN tahun 2021 sebesar Rp 67,5 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 22,5 miliar.

Ditemui ditempat terpisah, Bupati Sumba Timur, Kristofel Praing menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur NTT atas kunjungannya, serta menjelaskan bahwa Bendungan Kambaniru sebagai salah satu infrastruktur yang memiliki peran penting dalam sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Sumba Timur.

“Saya pikir dengan kunjungan Pak Menteri dan Pak Gubernur, memberi harapan bagi masyarakat Sumba Timur dan Pemerintah Kabupaten untuk dapat bangkit menyelesaikan beberapa infrastruktur yang diantaranya Bendungan Kambaniru. Kita tahu bahwa bendungan Kambaniru mengairi 1440 hektar sawah dan ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya pada bendungan tersebut. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur kami, karena kedatangan Bapak berdua bersama rombongan tentu memberi secercah harapan dan semangat bagi kami semua untuk bangkit kembali, “ tuturnya.

Setelah meninjau Bendungan Kambaniru Menteri bersama Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta rombongan mengunjungi Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba Timur yang merupakan satu satunya universitas yang ada di Pulau Sumba.

Kunjungi Areal Food Estate di Sumba Tengah

Masih dihari yang sama setelah melaksanakan kunjungan pada dua lokasi berbeda di Kabupaten Sumba Timur, sekitar pukul 15.30 Wita, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat beserta rombongan langsung menuju areal _food estate_ (lumbung pangan) di Kabupaten Sumba Tengah.

Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa _food estate_ adalah wujud dan komitmen Pemerintah Daerah NTT dalam menjaga stabilitas pangan serta menghadirkan pertanian yang maju dan modern.

“Tentunya saya ingin melihat _major project_ yang ada di Sumba seperti _food estate_ dapat berjalan dengan baik kedepannya sehingga benar-benar dapat mewujudkan apa yang dinamakan ketahanan pangan, serta pertanian juga semakin maju dan modern,” paparnya.

“Selain itu, terkait dengan potensi energi terbarukan yang ada di Pulau Sumba, kita dari Pusat tentu sangat mendukung melalui penelitian yang sementara kita kerjakan. Karena untuk hasilkan listrik dalam jumlah yang besar, sekitar 20 Gigawatt dalam kawasan ini, maka diperlukan beberapa indikator tertentu yang harus terpenuhi, seperti lamanya sinar matahari, keterikan mataharinya, dan dimana titik inklimasi yang paling baik kita peroleh,” jelasnya.

Untuk diketahui sejak tahun 2020 Pulau Sumba dijadikan daerah percontohan untuk energi terbarukan di Indonesia. Potensi yang dimiliki Pulau Sumba sehingga menjadi daerah percontohan untuk energi terbarukan melalui program “Sumba Iconic Island”. Dimana Program “Sumba Iconic Island” merupakan wujud keberpihakan negara untuk menciptakan pemerataan pembangunan di pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal melalui peningkatan akses energi berkelanjutan. (BAP/MI/IB)